

Judul : Ada 138 kasus penculikan: bongkar sindikat perdagangan anak
Tanggal : Senin, 24 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

Ada 138 Kasus Penculikan

Bongkar Sindikat Perdagangan Anak

ANGGOTA Komisi III DPR Sarifudin Sudding menegaskan sindikat penculikan dan perdagangan anak di bawah umur merupakan kejahatan serius di Indonesia. Sehingga, kepolisian harus membongkar jaringan mereka agar anak Indonesia bisa hidup dengan aman. "Para pelaku harus ditindak secara tegas karena sangat meresahkan," kata Sudding dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).

Komis Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, ada sebanyak 138 kasus penculikan dan perdagangan anak selama 2021-2024. Sudding menilai, maraknya peristiwa tersebut menunjukkan lemahnya sistem perlindungan anak yang mudah disalahgunakan oleh pelaku kejahatan.

Senada, Anggota Komisi III DPR Lola Neldia Oktavia mende-sak kepolisian memperkuat langkah pencegahan dan merespons cepat kasus penculikan anak di berbagai daerah. Keamanan anak harus menjadi prioritas negara dengan tanpa adanya kelengahan dalam penanganannya.

"Negara wajib hadir. Deteksi dini, respons cepat, dan edukasi masyarakat adalah kunci," tegas Lola dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).

Lola menekankan, setiap lapo-

ran orang hilang adalah kewajiban polisi untuk ditindaklanjuti secara langsung. Kecepatan penanganan menjadi faktor penentu penyelamatan korban.

Dia juga menyoroti pernyataan Wakapolri Dedi Prasetyo mengenai sejumlah Polsek yang dinilai kurang performa. Hal tersebut merupakan masukan penting yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh internal Polri. Seharusnya Polsek sebagai garda terdepan Polri memiliki standar kinerja yang kuat dalam investigasi, kesiapsiagaan, dan respons terhadap aduan masyarakat.

"Kami (Komisi III DPR) memandang evaluasi internal ini sebagai langkah perbaikan yang harus diperkuat," tegas anggota Fraksi Nasdem ini. Dia menambahkan, aparat kepolisian harus memastikan seluruh unit di tingkat akar rumput hadir secara administratif. Juga mampu memberikan perlindungan nyata untuk membangun kepercayaan publik.

Untuk itu, Lola meminta kepolisian melakukan pembenahan yang lebih sistematis. Seperti, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan kinerja, dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kasus kekerasan terhadap anak maupun



Sarifudin Sudding

orang hilang.

Dia menegaskan, keselamatan warga, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, merupakan mandat yang tidak bisa dinegosiasikan. "Ini prioritas. DPR akan terus mengawal," tegasnya.

Sementara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus penculikan anak yang terjadi belakangan ini. Situasi ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak bahwa pengawasan, kewaspadaan, dan

sistem perlindungan anak harus diperkuat di semua level.

"Kekerasan dan berbagai bentuk perlakuan salah terhadap anak, termasuk penculikan adalah pelanggaran berat terhadap hak anak," tegas Arifah dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).

Ketika seorang anak menjadi korban penculikan, kata Arifah, artinya masih terdapat celah dalam pengawasan dan perlindungan. Negara, keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat harus hadir memastikan anak-anak terlindungi, baik di rumah, di sekolah, maupun di ruang publik.

Arifah menjelaskan, peningkatan kerentanan anak terhadap penculikan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Antara lain lemahnya pengawasan, kedekatan pelaku dengan keluarga, pemanfaatan media sosial (medsos) untuk memantau aktivitas anak, serta rendahnya kewaspadaan lingkungan.

"Banyak kasus menunjukkan pelaku bukan orang asing, tetapi berasal dari lingkungan terdekat. Sehingga, masyarakat perlu memiliki kepekaan kolektif terhadap potensi ancaman," kata Arifah.

Oleh karena itu, Arifah mendorong penguatan peran keluarga. Caranya, pola pengasuhan yang waspada dan responsif,

pendampingan anak di ruang publik, komunikasi terbuka, dan memberikan edukasi kepada anak mengenai situasi berbahaya. Lingkungan sosial juga didorong untuk lebih peduli dan tanggap terhadap tanda-tanda mencurigakan di sekitar mereka.

Selain itu, Arifah meminta hukuman yang setimpal harus diberikan kepada para pelaku. Langkah ini penting dilakukan agar ada efek jera dan kejahatan yang sama tidak terus terulang kembali. "Penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu akan memberikan kepastian hukum di masyarakat," kata Arifah.

Komisisioner KPAI Ai Maryati Solihah menambahkan, sepanjang 2021-2024, tercatat sebanyak 138 kasus penculikan dan perdagangan anak. Angka itu belum mencerminkan kondisi sebenarnya.

"Ini fenomena gunung es. Dalam tiga tahun terakhir ada 138 kasus, mulai dari perdagangan, penculikan, hingga eksploitasi," sebut Ai dalam keterangannya, Minggu (16/11/2025).

Untuk itu, Ai mendorong aparat penegak hukum dan kementerian terkait bertindak lebih tegas. Tujuannya, untuk mencegah tindak pidana perdagangan anak yang memanfaatkan celah di media sosial (medsos). ■ TIF